

TRANSFORMASI ORGANISASI PEMERINTAH DARI ERA ORDE BARU KE ERA REFORMASI (STUDI KASUS DARI DIREKTORAT SOSIAL POLITIK MENJADI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

Basyiruddin¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan proses perubahan organisasi Ditsospol hingga menjadi Badan Kesbangpol, perubahan paradigma organisasi Ditsospol hingga menjadi Badan Kesbangpol serta perbedaan struktur, tugas dan fungsi organisasi Ditsospol hingga menjadi Badan Kesbangpol.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses perubahan organisasi Ditsospol hingga menjadi badan Kesbangpol Kaltim merupakan imbas dari beralihnya kekuasaan Orde Baru ke Reformasi. Sehingga pada tahun 2000 organisasi Ditsospol dan Mawil Hansip digabung menjadi Badan Kesbang Linmas Kaltim dan kembali berubah pada tahun 2007 menjadi badan Kesbangpol Kaltim. Kemudian perubahan paradigma organisasi Ditsospol dan Kesbangpol saat ini terletak pada cara pandang yang dahulu menggunakan pendekatan keamanan dan sekarang pendekatan kesejahteraan dan juga ditiadakannya fungsi litsus saat ini. Dalam struktur pimpinan organisasi juga terdapat perbedaan yang dahulu dipimpin dari kalangan ABRI, maka sekarang dipimpin oleh kalangan sipil serta tugas pokok dan fungsi juga mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan efektifitas kinerja birokrasi.

Kata Kunci : *transformasi, Direktorat Sosial Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Pendahuluan

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan sebuah momen paling bersejarah bagi perjalanan demokratisasi di Indonesia. Peristiwa ini diibaratkan sebagai sebuah tunas baru yang akan tumbuh dan berkembang untuk mencerahkan iklim demokrasi di Indonesia. Reformasi 1998 yang dimulai pada bulan Mei juga tercatat sebagai sebuah langkah awal untuk mengakhiri rezim otoriter yang dipraktekan pemerintahan Orde Baru. Orde Baru yang selama masa

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : basyiruddin25@gmail.com

pemerintahannya lebih dari tiga puluh dua tahun menerapkan sistem monopoli kekuasaan yang di komandoi oleh Soeharto.

Transformasi peralihan kekuasaan tentu saja memberikan angin segar bagi dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mulai dari pusat hingga daerah. Hal ini diantaranya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap perkembangan organisasi pemerintah yang sempat eksis di zaman Orde Baru bahkan pergerakannya cenderung bersifat repressif agar segera kembali menyesuaikan dengan perubahan rezim dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang lebih demokratis di era Reformasi ini. Salah satu diantaranya ialah lembaga Direktorat Sosial Politik.

Direktorat Sosial Politik pada zaman Orde Baru memiliki otoritas yang kuat berkaitan dengan pengendalian keadaan sosial politik masyarakat termasuk istilah yang terkenal pada masa itu adalah *litsus* (penelitian khusus) yang diterapkan dalam rangka menjaga pemahaman pengetahuan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan dan pengetahuan bela negara serta pengetahuan sosial politik. Litsus ini diterapkan sejak seleksi calon pegawai negeri, calon-calon pejabat Kabupaten/ Kota dan Provinsi, calon anggota DPRD provinsi dan Kab/ Kota, calon Bupati/Walikota termasuk calon Gubernur sehingga para pejabat yang pada akhirnya terpilih menjadi pimpinan di daerah dan anggota legislatif memiliki pemahaman yang relatif sama tentang tatanan kenegaraan, ideologi bangsa dan tata aturan pemerintahan.

Setelah memasuki era reformasi, kran demokrasi begitu terbuka sehingga melahirkan semangat pembentukan pemerintahan yang efisien dan efektif, maka pada 4 Agustus 2000, Direktorat Sosial Politik digabung dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) dengan sebutan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi bagian penting dalam pemerintahan daerah Provinsi Kaltim sesuai Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kembali berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 08 Tahun 2008.

Karena lembaga ini merupakan salah satu tangan kanan pemerintah di zaman Orde baru dan lembaga yang dikenal dengan pendekatan keamanannya serta terjadinya beberapa kali transformasi organisasi dari waktu ke waktu, maka dibutuhkan proses untuk menyesuaikan struktur, tugas dan fungsi yang awal mulanya dikendalikan oleh Ditsospol dan sekarang bertransformasi menjadi badan Kesbangpol.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana proses perubahan organisasi dari Direktorat Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ?,

Kedua, apakah ada perubahan paradigma organisasi dari Direktorat Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ?, *Ketiga*, apa saja perbedaan struktur, tugas dan fungsi organisasi dari Direktorat Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ?

Kerangka Dasar Teori

Transformasi Organisasi Pemerintah

Transformasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008:1484) transformasi adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dsb). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat menjelaskan transformasi dalam bentuk kata kerja menjadi mentransformasikan, yang berarti mengubah rupa bentuk, sifat, fungsi, dsb) dan juga berarti mengalihkan. Pengertian sama dijelaskan oleh kamus yang lain yaitu *Advanced English-Indonesian Dictionary* (1988) menjelaskan yang dimaksud transformation adalah perubahan bentuk dan dalam bentuk kata kerja merubah bentuk. Selanjutnya, *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (1995) menyebutkan transform sebagai kata kerja adalah "change completely the appearance or the character of". Berarti perubahan bentuk penampilan atau karakter secara total.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa transformasi merupakan suatu proses perubahan rupa, bentuk, tugas dan fungsi dari suatu kondisi ke kondisi lain untuk mencapai sesuatu tujuan yang lebih baik.

Organisasi Pemerintah

Wursanto (2003:53) organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama. Sementara, S. Prajudi Atmosudirjo (dalam Wursanto 2003:53) menjelaskan bahwa organisasi sebagai struktur tata-pembagian kerja dan sturuktur tata-hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian pemerintah menurut Ndraha (2003:74-75) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti diatur di dalam UUD (konstitusi) suatu negara.
2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di indonesia di bawah UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada Presiden dilimpahkan "concentration of power and responsibility".
3. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

4. Pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi

Transformasi Organisasi Pemerintah

Transformasi organisasi pemerintah merupakan suatu perubahan untuk membawa organisasi dari bentuk dan sistem yang lama ke bentuk dan sistem yang baru dengan menyesuaikan seluruh elemen (sistem, struktur, tugas, fungsi dll) dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaan negara yang telah ditetapkan selaras dengan visi dan misi organisasi pemerintah. Transformasi organisasi pemerintah sangat dianggap penting untuk dilakukan terkhusus kepada lembaga pemerintah yang sempat eksis di zaman Orde Baru salah satunya ialah lembaga Direktorat Sosial Politik agar bisa menyeimbangi dengan perubahan yang terjadi di era Reformasi yang lebih mengedepankan kepada prinsip demokrasi. Agar proses transformasi berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan maka perubahan organisasi harus memperhatikan faktor-faktor yang terjadi, sehingga transformasi organisasi sangat harus dilakukan.

Era Orde Baru ke Era Reformasi

Era Orde Baru ke Era Reformasi merupakan suatu peralihan kekuasaan dari era Orde Baru ke Era Reformasi yang merujuk pada pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa selama tiga puluh dua tahun dengan kepemimpinannya yang otoriter, militeristik dan repressif yang kemudian ditujukan untuk melakukan perubahan dan pembaruan dalam kehidupan yang lebih demokratis, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter, tertutup, tidak demokratis, serta merebaknya KKN menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa lahirnya era Reformasi telah membuka kondisi penyelenggaraan negara di Indonesia semakin mengarah ke alam demokratisasi.

Transformasi Organisasi Pemerintah dari Era Orde Baru ke Era Reformasi

Transformasi organisasi pemerintah dari era Orde Baru ke era Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi dalam organisasi pemerintah yang meliputi tugas, fungsi dan wewenang dari yang sebelumnya yang dirasa sangat otoriter menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik dan demokratis sesuai dengan tujuan reformasi.

Organisasi pemerintah di zaman Orde Baru lebih cenderung bersifat sentralistik dan tunduk serta patuh terhadap pimpinan penguasa pada saat itu. Di lain sisi, keterlibatan militer dalam Birokrasi teisi dalam menduduki pos-pos pemerintahan yang dianggap strategis salah satunya Direktorat Sosial Politik.

Untuk membatasi agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis mengacu kepada beberapa indikator penelitian, yaitu: Proses perubahan

organisasi, perubahan paradigma organisasi yang terjadi pada Direktorat Sosial Politik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta perbedaan struktur, tugas dan fungsi organisasi Direktorat Sosial Politik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Moelong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering di tanyakakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa di manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Perubahan Organisasi Direktorat Sosial Politik Menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Proses perubahan organisasi Direktorat Sosial Politik terjadi dari adanya peralihan kekuasaan pasca pemerintahan Orde Baru yang diikuti dengan tuntutan masyarakat dari segala bidang dengan semangat pembentukan reformasi birokrasi. Sehingga organisasi pemerintah di zaman Orde Baru juga mengikuti perubahan sesuai dengan kondisi yang berlaku di era Reformasi ini yaitu lebih demokratis. Karena semangat reformasi yang mendorong agar semua institusi atau lembaga pemerintahan dapat melahirkan semangat pembentukan pemerintahan yang efisien dan efektif. Maka pada 4 Agustus 2000, Direktorat

Sosial Politik digabung dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) berdasarkan hasil kajian dari biro organisasi setelah diadakannya rapat dan pertemuan antara pejabat-pejabat Direktorat Sosial Politik dan Mawil Hansip seluruh Indonesia. Agar tidak banyak tugas yang dikerjakan maka dileburkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Hal itu kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Setelah berjalan kurang lebih hingga tahun 2008, Badan Kesbang Linmas mengalami perubahan, dengan tugas Linmas yang dipindahkan ke badan pemerintahan lain. Maka jadilah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 08 Tahun 2008.

Berikut penulis akan memberikan gambaran mengenai tahun perubahan organisasi hingga menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 :

Perubahan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tahun	Organisasi	Era Pemerintahan
1	1970-1978	Direktorat Pusat	Orde Baru
2	1978-2000	Direktorat Sosial Politik	Orde Baru
3	2000-2008	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Reformasi
4	2008-Sekarang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Reformasi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa proses perubahan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik ialah awal mulanya bernama Direktorat Pusat yang bertahan selama kurang lebih 8 tahun. Kemudian berubah kembali menjadi Direktorat Sosial Politik yang bertahan kurang lebih 22 tahun hingga akhir Orde Baru. Kemudian di era Reformasi berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kurang lebih 7 tahun dan terakhir berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2008 hingga sekarang.

Perubahan Paradigma Organisasi Direktorat Sosial Politik Hingga Menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Berikut penulis memberikan gambaran berkaitan dengan perubahan paradigma Organisasi Direktorat Sosial Politik hingga menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2:
Perubahan Paradigma Organisasi Ditsospol- Kesbangpol

No	Perubahan Paradigma Organisasi		Ket
	Direktorat Sosial Politik	Badan Kesbangpol	
1	Pendekatan Kekuasaan dan Keamanan.	Pendekatan Kesejahteraan	✓
2	Adanya Litsus/ screening terhadap eks PKI, calon PNS, Gubernur, Bupati/ Walikota dan calon anggota DPRD Prov, Kab/ Kota.	Dihilangnya Litsus seiring dengan pergantian era pemerintahan Orde Baru-Reformasi	✓
3	Pimpinan organisasi dari ABRI	Pimpinan organisasi dari kalangan sipil	✓
4	Sangat berperan terhadap intervensi Partai Politik	Partai Politik memiliki kebebasan dalam mengurus keberlangsungan partai	✓
Keterangan : ✓ = Ada Perubahan			

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa perubahan paradigma organisasi Direktorat Sosial Politik hingga menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terletak pada pendekatan keamanan yang dahulu dilakukan oleh Direktorat Sosial Politik dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri. Sedangkan perubahan paradigma Kesbangpol saat ini pendekatan yang dilakukan tidak lagi pendekatan keamanan melainkan pendekatan kesejahteraan dalam menangani segala urusan sosial dan politik seiring dengan berlangsungnya era Reformasi saat ini.

Perbedaan Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi dari Direktorat Sosial Politik Hingga Menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Berikut penulis memberikan gambaran mengenai perbedaan struktur, tugas dan fungsi organisasi Direktorat Sosial Politik hingga menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 3:
Perbedaan Struktur, Tugas dan Fungsi

No	Indikator	Perbedaan Struktur, Tugas dan Fungsi			Ket
		Direktorat Sosial Politik	Badan Kesbang Linmas	Badan Kesbangpol	
1	Struktur	Pimpinan Berasal dari kalangan ABRI	Pimpinan berasal dari kalangan sipil	Pimpinan berasal dari kalangan sipil	✓
2	Tugas dan Fungsi	- fungsi litsus dan fungsi wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri semua terkiblat pada organisasi Direktorat Sosial Politik dan tugas fungsi lainnya yang di instruksikan oleh pemerintah pusat.	- Sudah di tiadakannya fungsi Litsus - Ditambahkannya fungsi Linmas - Dan fungsi lainnya yang terjabarkan dalam Peraturan Pemerintah.	- Fungsi Linmas sudah tidak ada lagi dan diambil alih oleh badan organisasi pemerintahan lainnya. - Dan fungsi lainnya yang terjabarkan dalam Perda Provinsi Kaltim No. 09 Tahun 2008.	✓
Keterangan :					
✓ = Ada Perbedaan					

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan struktur pimpinan organisasi Direktorat Sosial Politik, Badan Kesbang Linmas dan Badan Kesbangpol. Jika pada Direktorat Sosial Politik pimpinan organisasi berasal dari kalangan ABRI, maka pada Badan Kesbanglinmas dan Badan Kesbangpol sudah terjadi perubahan dengan pimpinan organisasi berasal dari kalangan sipil. selain itu, berkaitan dengan tugas dan fungsi bila pada organisasi Direktorat Sosial Politik terdapat fungsi litsus dan tugas fungsi lainnya yang di instruksikan oleh pemerintah pusat maka pada Badan Kesbang Linmas dan Badan Kesbangpol fungsi litsus sudah hapus dan ditambahkannya fungsi linmas pada Badan Kesbang Linmas. Setelah berjalan kurang lebih hingga tahun 2007, fungsi linmas

dipindahkan ke badan pemerintahan lainnya sehingga berubah kembali menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tugas dan fungsi yang terjabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2008.

Penutup

Kesimpulan

1. Organisasi Direktorat Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali perubahan organisasi. Proses perubahannya dimulai dari organisasi Direktorat Pusat yang kemudian berubah menjadi Direktorat Sosial Politik pada tahun 1978. Seiring dengan terjadinya era Reformasi, Semangat pembentukan pemerintahan semakin lebih ditingkatkan lagi. Hal ini dengan dileburnya antara Direktorat Sosial Politik dan Mawil Hansip atas pertemuan dan rapat koordinasi se Indonesia menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2000. Hal itu kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Setelah berjalan kurang lebih hingga tahun 2007, Badan Kesbang Linmas mengalami perubahan. Pemerintah mengkaji kembali agar kinerja lebih efektif dengan tugas Linmas yang dipindahkan ke badan pemerintahan lain. Maka jadilah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 08 Tahun 2008.
2. Perubahan paradigma organisasi Direktorat Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi perubahan paradigma organisasi. Perubahan paradigmanya yaitu dari paradigma yang menggunakan pendekatan kekuasaan/ keamanan menjadi paradigma yang lebih mengedepankan pada pendekatan kesejahteraan. Pada organisasi Direktorat Sosial Politik paradigma yang terjadi saat itu ialah pemerintah yang berkuasa hendak menjaga stabilitas politik dalam negeri dengan menjadikan organisasi Direktorat Sosial Politik sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yaitu dengan melakukan pendekatan kekuasaan/ keamanan dalam menjalankan keputusan dengan meyakinkan masyarakat agar sepaham dengan pemerintah dan tidak berada diluar jalur yang menentang pemerintah yang dianggap akan mengganggu stabilitas pembangunan dalam negeri. Dan juga adanya litsus atau istilah saat itu di screening terhadap individu masyarakat yang hendak mencalonkan diri menjadi PNS, Bupati/ Walikota, Gubernur maupun calon anggota DPRD. Sedangkan setelah berubah menjadi Badan Kesbang Linmas dan kemudian berubah lagi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik paradigma yang dikedepankan lebih kepada pendekatan kesejahteraan dengan lebih terbuka dan demokratis terhadap masyarakat khususnya ormas dan parpol, bukan lagi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengintervensi setiap kehidupan sosial politik masyarakat dengan cara pendekatan keamanan. Selain itu juga ketiadaan litsus saat ini, membuat organisasi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik bisa lebih fokus dalam menjalankan program kerja yang sudah ditetapkan khususnya dalam menjaga stabilitas politik di daerah dan memberikan informasi terkini seputar kondisi politik di daerah kepada gubernur.

3. Organisasi Direktorat Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi perbedaan struktur, tugas dan fungsi. Diantaranya terdapat perbedaan Struktur pimpinan organisasi yang sebelumnya pada Direktorat Sosial Politik di pimpin oleh kalangan ABRI, hingga sekarang setelah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak lagi dipimpin oleh ABRI melainkan dari kalangan sipil. Selain itu, dengan digabungannya Direktorat Sosial Politik dan Mawil Hansip menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat maka organisasi ini memiliki fungsi yang baru yaitu dengan ditambahkannya fungsi linmas pada Badan Kesbang Linmas yang kemudian setelah dilakukan pengkajian, fungsi linmas pada organisasi ini dipindahkan ke badan lain. Dengan keluarnya aturan baru maka organisasi ini kembali berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan perampingan tugas dan fungsi sebagaimana yang terjabarkan dalam Perda Kaltim No. 08 Tahun 2008.

Saran

1. Berkenaan dengan proses perubahan organisasi Direktorat Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, maka seharusnya organisasi ini memiliki sebuah buku/ dokumen/ artikel yang menjelaskan terkait dengan perjalanan atau perubahan sejarah organisasi, alasan-alasan perubahannya mulai dari Orde baru dengan organisasi Direktorat Sosial Politik hingga saat Reformasi ini menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting karena akan memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca terkait dengan keberadaan eksistensi organisasi ini mulai dari Orde Baru – Reformasi.
2. Sehubungan dengan berubahnya paradigma organisasi dari Direktorat Sosial Politik hingga menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, maka seharusnya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sekarang sudah menjadi SKPD daerah bisa lebih memandang arah atau tujuan organisasi dalam menjalankan/ meningkatkan kinerja kedepannya dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan menghilangkan pandangan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagaimana pada zaman Orde Baru dahulu dan menerapkannya sebagaimana era Reformasi saat ini. Hal ini penting agar organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bisa lebih diketahui oleh masyarakat terkait dengan eksistensi organisasi ini sendiri.
3. Oleh karena kepengurusan struktur pimpinan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi dipimpin dari kalangan ABRI melainkan dari kalangan sipil, maka sudah seharusnya

organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap bisa meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan kinerja birokrasi kedepannya.

4. Dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berawal dari organisasi Direktorat Sosial Politik, maka diharapkan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi bisa benar-benar diketahui oleh masyarakat yang selama ini banyak yang belum mengetahui tugas dan fungsi organisasi ini, sehingga sudah seharusnya organisasi ini bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi yang ada agar lebih familiar di masyarakat dan kebijakan yang dijalankan benar-benar bisa dirasakan dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eep Saefulloh Fatah, R. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjito, Dydiet. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Labolo, Muhammad. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Milles, B Mattheuwe dan Huberman A. Michaels. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduwan. 2005. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis Cetakan Ketiga*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemardjan, Selo. 2000. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutarto. 1991. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2009. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Perda Prov Kaltim No. 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Internet

- kbbi.web.id/transformasi,*
kesbangpolprovkaltim.info
<http://jaffraybittikaka.blogspot.com/2006/09/asal-usul-kata-transformasi.html>.
<http://mipi.or.id/jurnal-ilmu-pemerintahan/item/123-refomasi-dan-arah-perubahan-politik-indonesia-transisi-demokrasi-di-indonesia>
<http://st295011.sitekno.com/article/63057/optimalisasi-fungsi-kesbangpol-prov-jabar-analisis-usulan.html>.
<http://tatangsinaga21.blogspot.com/2012/10/transisi-politik-menuju-demokrasi.html>